

The page features a decorative design with three blue circles of varying sizes and thin blue lines. One line starts from the top left, goes down to a small circle, then up to a medium circle, and finally down to a large circle on the right. Another line starts from the top right, goes down to the medium circle, and then continues down to a large circle at the bottom right. The text is centered between these decorative elements.

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(RBA)
PERUBAHAN
TAHUN 2022**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	I
Daftar Isi	II
Ringkasan Eksekutif	III
Bab I Pendahuluan	1
A. Umum	1
B. Visi dan Misi BLUD	5
C. Budaya BLUD	6
D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas	8
Bab II Kinerja BLUD TA 2019 dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD TA 2020.....	11
A. Gambaran Kondisi BLUD	11
B. Proses Penilaian Kinerja BLUD	27
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD.....	27
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan	29
E. Ambang Batas Belanja BLUD.....	30
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja	30
Bab III Penutup	31
A. Kesimpulan	31
B. Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di era globalisasi tingkat persaingan semakin ketat, dalam sistem kesehatan nasional dan Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan telah digariskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Upaya kesehatan ditujukan untuk tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan harapan hidup manusia. Selain itu upaya kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup mandiri. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, bermukim di daerah terpencil, daerah terasing, daerah pemukiman baru termasuk daerah transmigrasi, maupun di daerah kumuh perkotaan. Upaya untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah menjadi penting, mengingat bahwa sasaran pelayanan kesehatan sebagian besar ditujukan kepada kelompok masyarakat tersebut.

Reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan Visi Pembangunan Kesehatan ” Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sarana Kesehatan serta Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Yang prima Dengan Peran Serta Aktif Sektor swasta dan Pemerintah Menuju Purworejo Sehat 2020”. Visi yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan tersebut adalah masyarakat Kabupaten Purworejo, penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, UPT Puskesmas Butuh mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar karena sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Purworejo bagian barat. Letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau maka UPT Puskesmas Butuh mampu menjadi Puskesmas Rujukan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo bagian barat.

Dalam melayani masyarakat perlu adanya kinerja yang baik dari puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat, memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Butuh , 23 Maret 2021
Kepala UPT Puskesmas Butuh

Dr. Christinawati
NIP.19710122 200212 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Sejarah dan Landasan Hukum BLUD

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Butuh terletak di Desa Dlangu Kecamatan Butuh masuk dalam wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sejak awal berdirinya sampai sekarang, Puskesmas Butuh telah mengalami beberapa peningkatan baik mengenai fisik bangunan, sarana dan prasarana Puskesmas hingga peningkatan jumlah sumber daya manusianya.

Puskesmas Butuh terletak di Jln Butuh Kebumen km 5 Kecamatan Butuh. Wilayah kerja antara lain :

- a. Desa kaliwatubumi
- b. Desa kaliwatu Kranggan
- c. Desa Panggel Dlangu
- d. Desa Binangun
- e. Desa Wironatan
- f. Desa Polomarto
- g. Desa Tlogorejo
- h. Desa Klepu
- i. Desa Tegalgondo
- j. Desa Butuh
- k. Desa Dlangu
- l. Desa Andong
- m. Desa Lugu
- n. Desa Lugurejo
- o. Desa Lubang Sampang
- p. Desa Kunir
- q. Desa Lubang Lor
- r. Desa Lubang Kidul
- s. Desa Lubang Indangan
- t. Desa Lubang Dukuh
- u. Desa Kunirejo kulon

Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai Puskesmas mempunyai 1 Puskesmas Pembantu.

Puskesmas sebagai salah satu unit kerja di bawah Dinas Kesehatan, walaupun telah ditetapkan menjalankan pola pengelolaan BLUD tentu tidak lepas dari kepentingan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Terkait dengan adanya PP nomor 23 tahun 2005 dan Permendagri nomor 61 tahun 2007, maka dalam upaya untuk pengusulan dan penetapan satuan kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan PPK-BLUD, Puskesmas Butuh termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang juga berkewajiban memenuhi persyaratan pada peraturan tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Dengan pengelolaan keuangan BLUD diharapkan Puskesmas Butuh akan lebih mampu bersaing dengan kompetitor yang saat ini sudah jauh melangkah ke depan, disamping juga akan lebih leluasa dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis guna menjawab tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna dan prima.

Dengan ditetapkannya Puskesmas menjadi BLUD diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam menyajikan layanan kesehatan yang menjadi hak Peserta program Jaminan Kesehatan. Sementara itu, menteri / pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan.. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumberdaya yang dimiliki, mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas.

Penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti UPT Puskesmas. Dengan demikian, UPT Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dalam pembaharuan manajemen keuangan sector publik maupun dalam peningkatan standar

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan sebutan Badan Layanan Umum.

Landasan hukum pelaksanaan BLUD di puskesmas antara lain sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- h) Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo nomor 45 tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18)
- j) Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
- k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- l) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/730/2015 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- m) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Terkait dengan adanya PP nomor 23 tahun 2005 dan Permendagri nomor 61 tahun 2007, maka dalam upaya untuk pengusulan dan penetapan satuan kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan PPK-BLUD, Puskesmas Butuh termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang juga berkewajiban memenuhi persyaratan pada peraturan tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Dengan pengelolaan keuangan BLUD diharapkan Puskesmas Butuh akan lebih mampu bersaing dengan kompetitor yang saat ini sudah jauh melangkah kedepan, disamping juga akan lebih leluasa dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis guna menjawab tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna dan prima.

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan BLUD

Kegiatan utama Puskesmas Butuh adalah dalam usaha pelayanan kesehatan perorangan dengan pendekatan pelayanan medis, tindakan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan upaya rujukan. Dengan *core* bisnis adalah pelayanan dasar meliputi pelayanan BP. Umum, KIA & KB, BP. Gigi dan pelayanan penunjang medik laboratorium, farmasi, gizi. Selain itu Puskesmas Butuh juga melayani pasien rawat inap dan IGD 24 jam.

Dalam upaya menghadapi persaingan global, terutama terhadap kompetitor layanan sejenis di Kabupaten Purworejo, Puskesmas Butuh berusaha memenangkan persaingan dengan cara menjaga mutu layanan, Leader dalam SDM dan Sarana Prasarana, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, serta akan menerapkan akreditasi Puskesmas. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Butuh banyak mendapatkan

perhatian baik dari komponen masyarakat secara individu/keluarga maupun secara institusi baik bisnis ataupun pendidikan.

Salah satu upaya pembinaan yang dilakukan di UPT Puskesmas Butuh adalah telah dilakukan supervisi dan evaluasi oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Purworejo, terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil pembinaan ini selanjutnya digunakan sebagai *feedback* dalam upaya penyempurnaan penyelenggaraan layanan publik. Upaya tersebut dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit-unit yang ada di Puskesmas Butuh

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. Program kerja (rencana strategi) sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi

Visi merupakan gambaran mengenai perwujudan dari kinerja organisasi yang ingin dicapai di waktu mendatang sebagai arah, perekat dan motivasi dalam pengembangan organisasi. Pernyataan visi harus dapat menumbuhkan rasa wajib dalam diri personil organisasi untuk dapat mewujudkannya, memberi tantangan, praktis dan realistis. Manajemen harus melakukan internalisasi, menjelaskan dan menyebarkan visi sehingga menjadi *shared division* dalam diri seluruh personil organisasi.

Visi UPT Puskesmas Butuh adalah :

“ Sehat untuk semua ”.

2. Misi

Misi merupakan penjelasan atas pilihan bisnis yang akan dijalankan oleh organisasi dalam menuju masa depan. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh organisasi, Puskesmas Butuh menetapkan misi organisasi sebagai berikut :

- a. Melayani Semua masyarakat.
- b. Membangun kerja sama dengan semua pihak.
- c. Meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia.

C. Budaya BLUD

Untuk melihat gambaran mengenai pencapaian hasil yang diinginkan, organisasi perlu menetapkan ukuran keberhasilan yang sering juga disebut sebagai tujuan yang merupakan penjabaran terhadap visi dan misi organisasi mengenai kondisi masa depan yang hendak diwujudkan.

Ukuran keberhasilan atau tujuan yang ingin dicapai Puskesmas Butuh adalah sebagai berikut :

Mewujudkan masyarakat Butuh yang :

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Tujuan organisasi tersebut telah mencakup empat perspektif dalam *Balanced Scorecard*, yaitu perspektif pelanggan (meningkatnya kepuasan pasien), perspektif proses bisnis internal (meningkatnya mutu pelayanan status puskesmas), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (meningkatnya kecukupan tenaga kesehatan, meningkatnya kemampuan dan keahlian SDM dan meningkatnya sarana/prasarana kesehatan), dan perspektif keuangan (meningkatnya kesehatan keuangan puskesmas).

Tata nilai merupakan pola cara berpikir dan aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai. Tata nilai juga merupakan

serangkaian niat, janji dan kesungguhan hati yang senantiasa dipegang teguh oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tata nilai diperlukan komitmen dari petugas untuk melaksanakannya. Dengan tata nilai yang jelas akan memberikan dorongan dan motivasi bagi petugas untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam berkarya.

Tata nilai yang dipakai di UPT Puskesmas Butuh adalah :

1. Disiplin
2. Profesional
3. Kerja sama

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas Butuh dan Dewan Pengawas

1. Susunan Pejabat Pengelola UPT BLUD Puskesmas Butuh sebagai berikut :

Pimpinan BLUD	: dr. Christinawati
Pejabat Pengelola Keuangan	: Siti Munawaroh
Pejabat Teknis	: drg. Kartika Listyowati
Bendahara Penerima	: Endang Trinik
Bendahara Pengeluaran	: Sri Yuni Wulandari
Penyimpan Barang	: Wiwit Setiyawati
Pengurus Barang	: Rina Parwati

2. Uraian pembagian tugas di antara masing-masing Pengelola BLUD UPT Puskesmas Butuh sebagai berikut :

a. Pimpinan BLUD mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD
- 2) Menyusun renstra bisnis BLUD
- 3) Menyiapkan RBA
- 4) Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan

- 5) Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - 6) Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan, mempunyai tugas yaitu :
- 1) Mengkoordinasikan penyusunan RBA
 - 2) Menyiapkan DPA BLUD
 - 3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan kas
 - 5) Melakukan pengelolaan utang piutang
 - 6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventasi
 - 7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
 - 8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
- c. Pejabat Teknis
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya
 - 2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA
 - 3) Mempertanggung jawabkan kinerja operasional yang meliputi pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan.
 - 4) Bertanggung jawab atas mutu, standarisasi, administrasi peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya kesehatan.
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bendahara Penerimaan
- 1) Menerima dana retribusi pelayanan kesehatan
 - 2) Menerima dana pelayanan kesehatan lainnya
 - 3) Melaksanakan pembukuan penerimaan
 - 4) Mempertanggung jawabkan keuangan

- 5) Menyetorkan hasil penerimaan karcis/ retribusi lainnya
 - 6) Membuat laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
- e. Bendahara Pengeluaran
- 1) Merencanakan belanja Puskesmas
 - 2) Mempersiapkan SPJ
 - 3) Mempertanggungjawabkan keuangan
 - 4) Membuat laporan pengeluaran
- f. Penyimpanan Barang
- 1) Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah
 - 2) Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima
 - 3) Meneliti jumlah dan kualitas barang yang sesuai dengan dokumen pengadaan
 - 4) Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku/kartu barang
 - 5) Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan
 - 6) Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD
- g. Pengurus Barang
- 1) Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang syah kedalam kartu inventaris barang (KIB), kartu inventaris ruangan (KIR), buku inventaris (BI), dan buku induk inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah
 - 2) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartuu pemeliharaan
 - 3) Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan inventaris lima tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola

- 4) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak digunakan lagi

BAB II
KINERJA BLUD TA 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TA 2021 UPT PUSKESMAS BUTUH

A. Gambaran Kondisi BLUD Puskesmas Butuh

1. Kondisi internal BLUD Puskesmas Butuh:

a. Gambaran Umum BLUD Puskesmas

1) Gambaran Umum

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Butuh terletak di Dlangu Kecamatan Butuh masuk dalam wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sejak awal berdirinya sampai sekarang, Puskesmas Butuh telah mengalami beberapa peningkatan baik mengenai fisik bangunan, sarana dan prasarana Puskesmas hingga peningkatan jumlah sumber daya manusianya.

Berikut kami sajikan tentang peta wilayah kerja UPT Puskesmas Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.

Puskesmas Butuh terletak di Jln. Butuh Kebumen KM 5 dengan Wilayah kerja antara lain :

- a) Desa kaliwatubumi
- b) Desa kaliwatukranggan
- c) Desa panggell Dlangu
- d) Desa Binangun
- e) Desa Wironatan
- f) Desa Polomarto
- g) Desa tlogorejo
- h) Desa Klepu
- i) Desa tegalgondo
- j) Desa Butuh
- k) Desa Dlangu
- l) Desa Andong
- m) Desa Lugu
- n) Desa Lugurejo
- o) Desa Lubang Sampang

- p) Desa Kunir
- q) Desa Lubang Lor
- r) Desa Lubang Kidul
- s) Desa Lubang indangan
- t) Desa Lubang Dukuh
- u) Desa Kunirejo kulon

Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai Puskesmas Induk, Puskesmas Butuh mempunyai satu Puskesmas Pembantu.

Penduduk Wilayah Kerja UPT Puskesmas Butuh mengalami penambahan selama tiga tahun terakhir seperti yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk wilayah Kerja UPT Puskesmas Butuh
Tahun 2017-2019

<i>No</i>	<i>Jenis Kelamin</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
1	Laki-laki	13825	11494	11509
2	Perempuan	14105	12002	12021
	Jumlah	27930	23496	23530

Sumber : BPS Kabupaten Purworejo

Terkait dengan adanya PP nomor 23 tahun 2005 dan Permendagri nomor 61 tahun 2007, maka dalam upaya untuk pengusulan dan penetapan satuan kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan PPK-BLUD, Puskesmas Butuh termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang juga berkewajiban memenuhi persyaratan pada peraturan tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Dengan pengelolaan keuangan BLUD diharapkan Puskesmas Butuh akan lebih mampu bersaing dengan kompetitor yang saat ini sudah jauh melangkah kedepan, disamping juga akan lebih leluasa dalam

menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis guna menjawab tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna dan prima.

2) Bidang Kegiatan

Kegiatan utama Puskesmas Butuh adalah dalam usaha pelayanan kesehatan perorangan dengan pendekatan pelayanan medis, tindakan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, dan upaya rujukan. Dengan *core* bisnis adalah pelayanan dasar meliputi pelayanan BP. Umum, KIA & KB, BP. Gigi dan pelayanan penunjang medik laboratorium, farmasi, gizi. Dalam upaya menghadapi persaingan global, terutama terhadap kompetitor layanan sejenis di Kabupaten Purworejo, Puskesmas Butuh berusaha memenangkan persaingan dengan cara menjaga mutu layanan, Leader dalam SDM dan Sarana Prasarana, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, serta akan menerapkan akreditasi Puskesmas. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Butuh banyak mendapatkan perhatian baik dari komponen masyarakat secara individu/keluarga maupun secara institusi baik bisnis ataupun pendidikan.

Salah satu upaya pembinaan yang dilakukan di UPT Puskesmas Butuh adalah telah dilakukan supervisi dan evaluasi oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Purworejo, terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil pembinaan ini selanjutnya digunakan sebagai *feedback* dalam upaya penyempurnaan penyelenggaraan layanan publik. Upaya tersebut dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit-unit yang ada di Puskesmas Butuh

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu

organisasi. Program kerja (rencana strategi) sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

3) Organisasi dan sumber daya manusia

Organisasi UPT Puskesmas Butuh mengacu pada Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 93 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Nomor 188/123/2017, terdiri dari :

- a) Kepala Puskesmas
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
 - (1) Promosi Kesehatan dan UKS
 - (2) Kesehatan Lingkungan
 - (3) KIA-KB
 - (4) Gizi
 - (5) P2 Penyakit
 - (6) Perkesmas
- d) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
 - (1) Pemeriksaan Umum
 - (2) Pemeriksaan Gigi dan Mulut
 - (3) KIA-KB
 - (4) Gizi
 - (5) Kefarmasian
 - (6) Laboratorium
 - (7) Persalinan
 - (8) Instalasi Gawat Darurat
 - (9) Pelayanan Kesehatan Lansia & rawat inap
- e) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasyankes

Jumlah pegawai Puskesmas Butuh tahun 2020 sebanyak 57 orang, yang terdiri dari :

Pegawai Tetap : 34 Orang

Pegawai Honorer : 22 Orang

Jumlah : 56 Orang

b. Pelayanan

Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu:

1) *Customer Acquisition.*

Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana "pasien baru" menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 4 tahun terakhir jumlah kunjungan pasien baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2 Kunjungan Pasien Baru

Tahun	Pasien Baru	Total Pasien	%
2017	2.184	20.782	10,50
2018	1.750	21.029	8,32
2019	11.990	47.882	25,04
2020	1.434	33.350	4,3
Rata-rata	4.340	30.761	12,4

2) *Customer Loyalty.*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana puskesmas mampu mempertahankan pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 4 tahun terakhir rata-rata 13,73 % dengan kunjungan pasien lama terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 62,44 % dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 95,70 %.

Perkembangan kunjungan pasien lama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Perkembangan Kunjungan Pasien Lama

Tahun	Pasien Lama	Total Pasien	%
2017	18.598	29.782	62,44
2018	19.279	21.029	91,67
2019	35.898	47.822	75,06
2020	31.916	33.350	95,70%
Rata-rata	26.423	32.996	57,53%

3) Keluhan Pasien.

Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 2.4 Kepuasan Layanan

TAHUN	JML PASIEN	FISIK		NON FISIK	
		KELUHAN	%	KELUHAN	%
2017	29.942	8	0,02	19	0,06
2018	21.029	0	0	26	0,12
2019	47.822	0	0	14	0,02
2020	33.350	0	0	6	0,02

c. Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan puskesmas baik dari sumber pendanaan maupun pembiayaan. Dalam mengukur perspektif keuangan digunakan 3 indikator sebagai berikut :

1) Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan (*Sales Growth Rate*)

Sales Growth Rate (SGR) : Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan puskesmas menggali pendapatan fungsional dari jasa layanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan fungsional Puskesmas Butuh dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5 Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan Fungsional		Prosentase
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
2017	1.373.856.530	1.129.004.104	82,17 %
2018	1.400.000	1.250.739.484	89.33 %
2019	1.509.401.745	1.580.904.544	104,73 %
2020	1.593.996.006	1.477.067.021	92,66%

Perkembangan realisasi Pendapatan Fungsional, yaitu merupakan pendapatan utama (*core business*) Puskesmas Butuh. Dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Pendapatan Fungsional

Tahun	Pendapatan Fungsional		Prosentase
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
2016	1.455.145.000.00	1.089.056.476,00	74,84 %
2017	1.373.856.530	1.129.004.104	82,17 %
2018	1.400.000.000	1.250.739.484	89.33 %
2019	1.509.401.754	1.580.904.544	104,73 %
2020	1.593.996.006	1.477.067.021	92,66%

Perkembangan Pertumbuhan Pendapatan (*Sales Growth Rate*):

Pertumbuhan pendapatan merupakan selisih pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Perkembangannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Formula	SGR
2016	$\frac{1.089.056.476 - 1.455.145.000}{1.455.145.000}$	0,25 %
2017	$\frac{1.129.004.104 - 1.089.056.479}{1.089.056.479}$	3,6 %
2018	$\frac{1.250.739.484 - 1.129.004.104}{1.129.004.104}$	10,7 %
2019	$\frac{1.580.904.544 - 1.250.739.484}{1.250.739.484}$	26,39 %
2020	$\frac{1.593.996.006 - 1.477.067.021}{1.477.067.021}$	7,92%

2) Perkembangan (*Cost Recovery*)

Cost recovery merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan puskesmas membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni puskesmas. Rincian perkembangan *cost recovery* diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perkembangan Cost Recovery

Uraian	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp)
Pendapatan (Fungsional)	1.129.004.104	1.250.739.484	1.580.904.544	1.477.067.021
Biaya (Operasional non modal)	965.257.931	959.974.540	1.365.250.065	1.400.987.600
<i>Profit margin/ Cost recovery</i>	116,96 %	130,28 %	115,79 %	105,43%

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan *Cost recovery* puskesmas masih diatas 100 %. Hal ini menunjukkan puskesmas secara operasional sudah mampu membiayai kegiatannya.

3) Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan Puskesmas

Indikator ini menggambarkan kemampuan Puskesmas untuk membiayai seluruh pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan puskesmas sendiri. Secara tabel diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.9 Tingkat Kemandirian Keuangan

Uraian	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp)
Pendapatan Fungsional	1.129.004.104	1.250.739.484	1.580.904.544	1.477.067.021
Total Belanja	1.151.382.462	1.593.248.618	1.583.884.065	1.428.457.600
Tingkat Kemandirian	101,98 %	127.38%	100,18 %	103,40%

d. Organisasi dan SDM

Komposisi SDM berdasarkan keahlian dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.10 SDM Berdasar Keahlian

Uraian	2017	2018	2019	2020
Dokter umum	2	1	2	2
Dokter gigi	1	1	1	1
Perawat	4	10	12	13
Bidan	20	21	21	22
Tenaga medis lain	2	1	10	9
Tenaga Non Medis	11	10	11	9
Jumlah	40	44	57	56

Jumlah tenaga secara umum cenderung fluktuatif . Untuk kedepan kualifikasi SDM akan ditingkatkan sejalan dengan kebutuhan yang meningkat terhadap tenaga medis untuk pengembangan dan meningkatkan mutu pelayanan baru.

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.11 SDM Berdasar Pendidikan

Uraian	2017	2018	2019	2020
S2	-	-	0	
S1	7	7	8	8
DIV	0	1	0	1
DIII	24	31	40	39
DI	1	-	0	
SLTA	7	4	9	8
SLTP	1	0	0	
Jumlah	40	43	57	56

Jumlah tenaga berdasarkan komposisi pendidikan terbanyak adalah tenaga berpendidikan D3, hal ini menunjukkan tenaga/SDM yang dimiliki oleh puskesmas dinilai cukup berkualitas dan terampil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

e. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki UPT BLUD Puskesmas Butuh saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kuantitas pelayanan bagi masyarakat, dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan gedung dan penambahan peralatan yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan Nilai Aset Per tahun:

Tabel 2.12 Nilai Aset Puskesmas Butuh

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Tanah & Gedung	6.593.269.060	6.627.246.060	6.627.246.060	6.657.269.060
Aset Peralatan Medis	814.207.769	791.780.924	849,862,170.00	833.351.745
Aset Peralatan Non Medis	1.014.906.903	1.521.951.475	1,712,361,470.00	1.724.607.462
Jalan, jaringan, irigasi				4.360.000
Total	8.414.310.732	8.940.978.459	9,189,469,700	9.219.588.267

Tabel 2.13 Kondisi Aset Puskesmas Butuh

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peralatan medis dengan kualifikasi baik	117	279	319	
Jumlah Peralatan Medis	117	279	319	
% Peralatan yang berkualifikasi baik	100%	100%	100%	

2. Kondisi eksternal BLUD Puskesmas Butuh

Kondisi eksternal merupakan kondisi di luar UPT BLUD Puskesmas Butuh yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana UPT BLUD Puskesmas Butuh

tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional / regional / global dan lain-lain.

Faktor eksternal yang mungkin menjadi peluang puskesmas antara lain :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan
- 2) Kondisi sosial budaya daerah yang mendukung pelayanan kesehatan
- 3) Perkembangan teknologi kesehatan
- 4) Dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat
- 5) Berubahnya paradigma masyarakat terhadap program kesehatan
- 6) Kepercayaan masyarakat yang tinggi
- 7) Kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan semakin besar
- 8) Teknologi informasi berkembang pesat
- 9) Aspek geografis dan tata ruang yang mendukung

Sedangkan faktor eksternal yang bisa menjadi ancaman bagi puskesmas antara lain :

- 1) Kondisi ekonomi daerah pada level menengah ke bawah
- 2) Perekonomian tidak stabil sehingga trend pelayanan kesehatan menurun
- 3) Tingkat inflasi dan nilai kurs
- 4) Ketatnya persaingan dengan kompetitor
- 5) Pelanggan mudah berpindah apabila produk yankes tidak sesuai harapan
- 6) Brand yankes lain lebih fleksibel dalam menetapkan harga
- 7) Aktifitas SDM dapat terganggu oleh aktifitas non rutin seperti event.

3. Asumsi Makro

Asumsi yang digunakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Inflasi : 2,98 %
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 %
- c. Kurs 1 US\$: 14.262,8
- d. Tingkat Bunga Deposito : 6 %
- e. Tingkat Bunga Pinjaman : 9,95 %

4. Asumsi Mikro

Asumsi yang digunakan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi BLUD UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo belum ditetapkan sehingga penyajian laporan keuangan berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang berlaku umum di lingkungan BLUD bidang kesehatan.

- b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah

- 1) APBD : Rp 0
- 2) Gaji PNS sebesar : Rp 1.269.259.739,00
- 3) BOK sebesar : Rp. 692.921.000,00

- c. Asumsi Tarif

Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UPT Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

d. Asumsi Volume Pelayanan

Volume pelayanan dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Volume Petugas
A	Rawat Jalan	
1	BP Umum	3 orang
2	BP Gigi	2 orang
3	KIA-KB	4 orang
4	Konsultasi Gizi	1 orang
5	Lansia	1 orang
6	Pendaftaran & rekam Medis	3 orang
7	Kasir	1 orang
8	Penunjang:	
	Laboratorium	2 orang
	Apotek	2 orang

e. Pengembangan pelayanan baru

Puskesmas/UPT merencanakan untuk pengembangan jenis pelayanan pada tahun 2020 yaitu Upaya Kesehatan kerja, Kesehatan olah raga, Kesehatan Jiwa, Hatra, Lansia

B. Proses Penilaian Kinerja BLUD

Penilaian kinerja (Kemandirian Puskesmas) UPT Puskesmas Butuh dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo setiap tahun sekali. Penilaian Kinerja ini meliputi :

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan
2. Manajemen Puskesmas
3. Mutu Pelayanan Puskesmas

Hasil penilaian kinerja Puskesmas Butuh tahun 2019 dengan rincian nilai sebagai berikut :

1. Cakupan hasil pelayanan kesehatan kategori : kurang (hal ini dikarenakan masa pandemi banyak program yang tidak berjalan.
2. Cakupan hasil manajemen kategori : Baik
3. Hasil mutu pelayanan kesehatan kategori : Baik

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLUD

Puskesmas Butuh ditetapkan menjadi BLUD pada tanggal 1 Januari 2016, Pencapaian kinerja tahun berjalan (2020) dan target kinerja yang akan dicapai (2021) untuk Pendapatan digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pencapaian kinerja tahun berjalan (2020) dan target kinerja yang akan dicapai (2021) seperti tertuang dalam tabel berikut.

No	Pencapaian Pendapatan 2020	Target Pendapatan 2021
1	1.477.067.021	1.858.360.353

2. Belanja

Pencapaian kinerja tahun berjalan (2020) dan target kinerja yang akan dicapai (2021) seperti tertuang dalam tabel berikut.

No	Pencapaian Belanja 2020	Target Belanja 2021
1	1.428.457.600	1.858.360.353

D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

Informasi lainnya meliputi pencapaian kinerja non keuangan yaitu capaian SPM tahun lalu, seperti dalam table berikut ini :

Pencapaian SPM Puskesmas Butuh Tahun 2017 - 2020

No	SPM	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) sesuai standar (minimal 4 kali)	92,63 %	100 %	100 %	99%
2	Pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	98,99 %	100 %	100%
4	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,15 %	79,79 %	100 %	96%
5	Penapisan (skrining) kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar	27,86 %	100 %	100 %	0%
6	Penapisan (skrining) kesehatan usia produktif sesuai standar	%	0.20 %	48,02 %	10.89%
7	Penapisan (skrining) kesehatan lanjut usia	78,37 %	6.19 %	82,86 %	57%
8	Pelayanan kesehatan penderita penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi)	22,02 %	7.74 %	8,13 %	0.475%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar	80,89 %	24.55 %	87,78%	46.57%
10	Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92.59 %	92.59 %	100 %	107.50%
11	Pelayanan kesehatan tuberkulosis (TB) sesuai standar	100 %	5.88 %	100 %	22%
12	Pemeriksaan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	100 %	3275 %	132,56 %	83%

E. Ambang Batas Belanja BLUD

Besaran ambang batas dalam RBA tahun biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Perubahan		
				Rp	%	
1	2017	1.373.856.530	1.151.382.462	222.474.068	16,19	
2	2018	1.809.868.172	1.593.248.618	216.619.554	11,97	
3	2019	1.726.760.792	1.583.884.065	142.876.727	8,27	
4	2020	2.115.432.899	1.477.067.021	638.365.878	30,17%	
5	2021	1.858.360.353	0	0	0	
Jumlah						36,73

Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2021 = $(36,73 : 5) = 7,35\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun anggaran 2021, maka besaran ambang batas = $7,35\% \times$

2.115.432.899,- = 155.406.893.2 . Dengan demikian ,apabila realisasi belanja masih di bawah Rp 2.115.432.899,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja untuk 3 (tiga) tahun kedepan merupakan proyeksi pendapatan dan belanja yang harus dihitung dengan memperhatikan output prioritas awal tahun anggaran berikutnya, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

No	Nama rekening	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	Jasa Layanan Umum	2.099.732.899	1.846.285.503	2.402.586.124	2,522,715,430	2,648,851,202
2	Hibah	0	0	0	0	0
3	Hasil Kerjasama	0	2.860.000	3.146.000	3,303,300	3,468,465
4	Pendapatan Lain - lain BLUD Yang Sah	14.950.000	8.464.850	9.311.335	9,776,902	10,265,747
5	Potongan Langsung di BPJS Kesehatan	750.000	750.000	825.000	866,250	909,563
	Jumlah Pendapatan	2,115,432,899	1,858,360,353	2,415,868,459	2,536,661,882	2,663,494,976

2. Prakiraan Maju Belanja BLUD

No	Nama rekening	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	Belanja Pegawai	1,269,259,739	780,016,212	987.140.807	1,036,497,847	1,088,322,740
2	Belanja Barang dan Jasa	718,025,810	998,866,741	1.341.302.512	1,408,367,638	1,478,786,019
3	Belanja Modal	128,147,350	79,477,400	87.425.140	91,796,397	96,386,217
	Jumlah Belanja	2,115,432,899	1,858,360,353	2,415,868,459	2,536,661,882	2,663,494,976

PAGU	Belanja	Pendapatan
TA 2020	2,115,432,899	2,115,432,899
TA 2021	1,858,360,353	1,858,360,353
TA 2022	2,415,868,459	2,415,868,459
TA 2023	2,536,661,882	2,536,661,882
TA 2024	2,663,494,976	2,663,494,976

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Bisnis Anggaran yang telah disusun ini merupakan target tahunan yang harus dicapai oleh Puskesmas .Dalam pelaksanaan pelayanan harus tetap berorientasi kepada kepuasa pelanggan.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan BLUD UPT Puskesmas Butuh antara lain:

1. Pihak manajemen harus memperhatikan kebijakan lanjutan dalam pelayanan kesehatan nasional BPJS Kesehatan yang memberikan kontribusi sangat besar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan.
2. Maraknya pesaing swasta yang menjadi mitra BPJS seperti dokter layanan primer , klinik pratama, dan bidan praktek mandiri.
3. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, yang tentunya akan berimbas pada kemampuan daya beli masyarakat.

LAMPIRAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(RBA)
PERUBAHAN
TAHUN 2022

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS BUTUH
KABUPATEN PURWOREJO